

ANALISIS DAYA SAING KOMODITAS KEDELAI DI SENTRA PRODUKS GUNA MENUNJANG PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI

*(The Analysis the Competitiveness on Soybean Commodities in Center
Production in the Agroindustry Development)*

Soetrisno

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobi
Fakultas Pertanian Universitas Jember

ABSTRAKT

The main objectives of this paper are to investigate the government price policy and its implication on the soybean farming competitiveness; and formulate policy alternatives to enhance the soybean commodity competitiveness in agro-industry sector. This study was conducted in soybean farming center at the Grajagan Village, Purwohardjo district, Banyuwangi regency. The site was selected based on the Location Quotient analysis. The research method used in this study is Policy Analysis Matrix (PAM). The result of the study are as follows: price policy of the soybean commodity system could produce production surplus by 4 %. This surplus enables producers to compete in the domestic market. To face the free trade, this policy could only achieve potential income of farming by 77 % and tempe-tofu industry by 91 %. With the current price policy, the soybean commodity still has an advantage shown by the comparative advantage with the DRC_{social} value of Rp 6.253 and domestic resource cost coefficient ($CDRC_{social}$) value of 0.67 as well as competitive advantage with the DRC_{actual} value of Rp 6.888 and the domestic resource cost coefficient ($CDRC_{actual}$) value of 0.74. Government price policy for soybean commodity does not provide incentive for the development of the tempe-tofu industry. This is shown by the Effective Protection and Profitability Coefficients (EPC and PC) which is less than 1 and the negative Subsidy Ratio to Producers (SRP) for both farming and agro-industry. Another policy alternative for increasing the soybean commodity competitiveness in agro-industry development is by increasing the productivity and output price protection at the farmers level. Another policy alternative is the subsidy of fertilizer and pesticide whenever other countries have the same policy.

Key words : *competitiveness, policy and agroindustry*

PENDAHULUAN

Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama disamping padi dan jagung. Kebutuhan terhadap hasil olahan seperti tempe, tahu, tauco, kecap dan bahan baku pakan ternak terus meningkat dari tahun ke tahun. Laju permintaan kedelai yang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan produksi dalam negeri menyebabkan defisit meningkat dari 968 ribu ton (1998) menjadi 1,1 juta ton (2001) dan 1,4 juta ton pada tahun 2005 atau meningkat sebesar 8,73 % per tahun. Tingginya permintaan kedelai dalam negeri menyebabkan impor kedelai

tetap berlangsung dalam jumlah yang besar.

Rendahnya kemampuan produksi domestik dalam penyediaan kedelai bila dibandingkan dengan permintaan memerlukan upaya untuk memperkecil kesenjangan. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara intensifikasi di sentra produksi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang bertumpu pada potensi sumberdaya. Strategi yang berpijak pada keunggulan sumberdaya seperti pemanfaatan lahan, tenaga kerja, modal dan lainnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi usahatani guna mengurangi impor yang pada gilirannya dapat menciptakan keunggulan daya saing. Hal ini bisa terwujud apabila kebijakan yang sedang berlangsung dan yang akan datang mampu memberikan dukungan demi tumbuh dan berkembangnya usahatani dan agroindustri kedelai.

Perkembangan agroindustri dapat berlangsung apabila komoditas pertanian dan perwilayahan komoditas didasarkan atas keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, memenuhi skala ekonomi, memberikan nilai tambah dan mampu mengendalikan produk secara kontinyu. Oleh karena itu lokasi komoditas pertanian memegang peranan penting bagi pengembangan wilayah dalam mewujudkan kekuatan pertanian sebagai pendukung pengembangan agroindustri.

Mengingat jenis agroindustri pertanian yang dapat dikembangkan di wilayah pedesaan relatif berpeluang baik, maka seyogyanya diprioritaskan pada agroindustri yang mampu menangkap efek ganda (*multiplier effect*) tinggi bagi pedesaan seperti halnya komoditas kedelai. Dengan demikian pengembangan sektor agroindustri sangat penting untuk mencapai beberapa tujuan ganda yaitu: menarik dan mendorong sektor pertanian, menciptakan struktur pertanian yang tangguh, menciptakan nilai tambah, meningkatkan perolehan devisa negara, menciptakan lapangan kerja; memperbaiki pendapatan dan meningkatkan daya saing.

Bertolak pada kerangka permasalahan yang mencakup potensi kedelai serta tujuan pengembangan sektor pertanian, maka tulisan ini mengkaji daya saing komoditas kedelai di sentra produksi dalam menunjang pengembangan agroindustri.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pengembangan agroindustri diarahkan agar dapat menumbuhkan industri pedesaan yang berimbang, meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja dengan mempersatukan tujuan pembangunan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta pilihan lokasi industri yang efisien yang sesuai dengan tipe maupun ukuran industri yang dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya diharapkan akan muncul suatu pola dan struktur pertanian yang berdiversifikasi, dengan kemandapan dalam arus bahan bakunya. Berbagai persoalan mendasar masih menjadi kendala, antara lain masalah teknologi yang kaya akan keterkaitan, sesuai dengan ketrampilan masyarakat dan lingkungan dengan komposisi serta kualitas sumberdaya setempat, masalah ketrampilan sumberdaya manusia serta persoalan infrastruktur seperti transportasi dan lain sebagainya.

Pendekatan PAM (*Policy Analysis Matrix*) yang dikemukakan Monke dan Pearson (1989) merupakan sistem analisis dengan memasukkan berbagai kebijakan

yang mempengaruhi penerimaan dan biaya produksi pertanian. Matriks disusun dengan memasukkan komponen-komponen utamanya penerimaan, biaya dan profit. PAM disusun untuk mempelajari masing-masing sistem produksi pertanian dengan mempergunakan data usahatani, pemasaran dari petani ke pengolah, pengolahan dan pemasaran dari pengolah kepedagang. Selanjutnya dapat ditaksir dampak kebijakan komoditas dan ekonomi makro dengan cara membandingkan dengan tanpa adanya kebijakan.

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan yaitu pengaruh kebijakan terhadap daya saing dan profit di tingkat usahatani, pengaruh kebijakan investasi terhadap efisiensi ekonomi dan keunggulan komparatif dapat dipelajari dengan menggunakan pendekatan PAM. Hasilnya dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi berbagai sistem produksi dikategorikan menurut komoditas yang diusahakan, teknologi yang digunakan, zone agroklimat dimana sistem usahatani diusahakan yang mampu bersaing dalam berbagai situasi. Kebijakan yang mempengaruhi harga-harga input dan output dapat dilihat perubahan profitnya seandainya terjadi perubahan kebijakan. Hasil analisis akan dapat menentukan komoditas manakah yang seharusnya mampu bersaing dan bagaimana profitnya berubah jika terjadi perubahan terhadap kebijakan harga. Hal kedua berkenaan dengan efisiensi ekonomi atau keunggulan komparatif berbagai sistem produksi dan bagaimana perubahan investasi masyarakat akan mengubah pola efisiensi (Soetriono, 1998)

BAHAN DAN METODE

Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja (*purposive*) di daerah sentra produksi di Desa Grajagan Kecamatan Purwohardjo Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada produksi dan tingkat produktivitas dengan analisis Location Quotient (Isard, 1969; Warpani, 1984; Wibowo, 1993 dan Soetriono, 1996). Unit analisis penelitian adalah petani yang melakukan intensifikasi usahatani kedelai pada musim kering tahun 2002. Untuk menganalisis daya saing di gunakan *Policy Analisis Matrix* (PAM) seperti tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Analisis Kebijakan

Uraian	Biaya			
	Revenue	Input Tradable	Input non Tradable	Profit
Harga Pasar	A	B	C	D ¹
Harga Sosial	E	F	G	H ²
Pengaruh divergensi dan kebijakan efisien	I ³	J ⁴	K ⁵	L ⁶

Dari informasi Tabel 1 diperoleh berbagai indikator analisis sebagai berikut:

1. Keuntungan Privat (D) = (A) - (B) - (C)
2. Keuntungan Sosial (SP) = (E) - (F) - (G)
3. Transfer Output (TO) = (A) - (E)

4. Transfer Input (TI) = (B) - (F)
5. Transfer Faktor (TF) = (C) - (G)
6. Transfer Bersih (TN) = (D) - (H)
7. Rasio Biaya Privat (PCR) atau $KBSD_{\text{aktual}} = C / A - B$
8. Rasio Biaya Sumberdaya Domestik atau $KBSD_{\text{sosial}} = G / E - F$
9. Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) = A / E
10. Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) = B / F
11. Koefisien Proteksi Efektif (EPC) = $A - B / E - F$
12. Koefisien Keuntungan (PC) = D / H
13. Ratio Subsidi bagi Produsen (SRP) = L / E

Analisis sensitivitas pada BSD_{sosial} , BSD_{aktual} dan PAM digunakan untuk mengetahui seberapa jauh perubahan harga output, harga input (harga pupuk, harga obat-obatan dan upah tenaga kerja), *Swadow Exchange Rate* (SER), Nilai Tukar Rupiah (NTR), tingkat produktivitas dan bea masuk (protektif) dapat mempengaruhi daya saing komoditas kedelai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keunggulan komparatif komoditas kedelai dapat dikaji dari Nisbah Biaya Sumberdaya Domestik (DRC) dan Nisbah Biaya Privat (PCR) yang terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis PAM Komoditas Kedelai di Desa Grajagan Kecamatan Purwohardjo Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2002.

Policy Analysis Matrix	Kedelai	Nilai Tempe	Tahu
Keuntungan Privat (BSD_{aktual})	601.352	3.101	3.553
Keuntungan Sosial (BSD_{sosial})	776.890	3.426	3.909
Transfer Output	158.201	0	0
Transfer Input	170.996	111	111
Transfer Faktor	162.742	213	244
Transfer Bersih	-175.537	-325	-355
Rasio Biaya Privat ($KBSD_{\text{aktual}}$)	0,74	0,59	0,39
Rasio Biaya Sumberdaya Domestik ($KBSD_{\text{sosial}}$)	0,67	0,55	0,34
Koefisien Proteksi Output Nominal	1,04	1,00	1,00
Koefisien Proteksi Input Nominal	1,14	1,14	1,14
Koefisien Proteksi Efektif	0,99	0,99	0,98
Koefisien Keuntungan	0,77	0,91	0,91
Rasio Subsidi bagi Produsen	-0,05	-0,04	-0,05

Sumber : Data primer, diolah 2003

Keterangan : bahan baku per 1 Kg kedelai untuk agroindustri

Tabel 2 menunjukkan bahwa produksi kedelai, produksi tahu dan tempe mempunyai nilai sumberdaya domestik lebih kecil dari harga sosial nilai tukar (Rp 9.323,00 per US \$) dan $KBSD_{\text{sosial}} < 1$. Hasil ini dapat membuktikan bahwa usahatani kedelai, agroindustri tempe dan tahu mempunyai keunggulan komparatif. Dari nilai BSD_{sosial} dan $KBSD_{\text{sosial}}$ yang diperoleh menunjukkan produksi kedelai di Kabupaten Banyuwangi mempunyai keunggulan komparatif, sehingga pengusahaan kedelai efisien secara ekonomi dalam menghemat sumberdaya domestik dan layak untuk diusahakan. Komoditas kedelai akan lebih menghemat devisa apabila komoditas ini terintegrasi secara vertikal dengan agroindustri seperti agroindustri tempe dan tahu yang nilai keunggulan komparatifnya lebih baik. Dengan mengusahakan kedelai, Kabupaten Banyuwangi akan mengurangi impor yang ada. Hal ini mengingatkan bahwa dari hasil analisis diperoleh nilai BSD_{sosial} lebih kecil dari Nilai Tukar Sosial atau $KBSD_{\text{sosial}} < 1$, sehingga lebih baik memproduksi kedelai sendiri dibandingkan harus mengimpor. Komoditas kedelai yang diusahakan secara monokultur dan diperdagangkan untuk substitusi impor mempunyai nilai $KBSD_{\text{sosial}} < 0,5$, menurut Wu dan Mao berarti aktifitas pengusahaan kedelai tersebut mempunyai keunggulan komparatif yang cukup stabil, artinya keunggulan komparatif akan tetap dimiliki walaupun terjadi perubahan harga input maupun output. Hal ini tidak terjadi pada komoditas kedelai yang diusahakan di lokasi penelitian dengan nilai $KBSD_{\text{sosial}}$ sebesar 0,67 berarti komoditas kedelai rentan terhadap perubahan harga input maupun output.

Analisis Biaya Sumberdaya Domestik berdasarkan harga aktual (BSD_{aktual} dan $KBSD_{\text{aktual}}$) digunakan untuk mendeteksi apakah pengusahaan komoditas kedelai, agroindustri tempe dan tahu di Kabupaten Banyuwangi mempunyai keunggulan kompetitif. Jika nilai BSD_{aktual} lebih kecil dari nilai tukar resmi atau nilai $KBSD_{\text{aktual}} < 1$ berarti mempunyai keunggulan kompetitif. Seluruh pengusahaan yang dilakukan oleh petani kedelai dan produsen tempe dan tahu mempunyai nilai BSD_{aktual} lebih kecil dari nilai tukar resmi (Rp 9.261,00 per US \$) dan nilai $KBSD_{\text{aktual}} < 1$, hal ini berarti pengusahaan komoditas kedelai, agroindustri tempe dan tahu di Kabupaten Banyuwangi mempunyai keunggulan kompetitif untuk diusahakan. Dari kenyataan ini diketahui kesejahteraan yang diperoleh petani dan pengrajin agroindustri kedelai (tempe dan tahu) secara individual layak untuk diusahakan dan mampu bersaing baik secara domestik maupun secara internasional. Hal tersebut didukung oleh pendapatan Rosegrant, et. al (1997), Simatupang (1990), Rusastra (1992) dan Hermanto (1993), yang menyatakan bahwa Jawa Timur khususnya di daerah sentra produksi kedelai (Banyuwangi, Jember dan Pasuruan) memiliki harapan besar dalam kelayakan ekonomis baik untuk pemenuhan kebutuhan lokal, antar daerah maupun ekspor. Kenyataan ini tidak terlepas dari dukungan lingkungan yang kondusif seperti kondisi tanah dan iklim yang sesuai, disamping tatalaksana pengairan yang terkelola secara baik.

Hal lain yang dapat ditunjukkan oleh analisis keunggulan komparatif dan kompetitif ini ternyata pengusahaan komoditas kedelai, agroindustri tempe dan tahu mempunyai keunggulan komparatif lebih tinggi daripada keunggulan kompetitifnya. Artinya pengusahaan kedelai, agroindustri tempe dan agroindustri tahu di Kabupaten Banyuwangi akan lebih besar mendatangkan manfaat (kesejahteraan) bagi masyarakat secara keseluruhan dibandingkan dengan secara

individu.

Dari tabel 2 juga dapat dijelaskan bahwa pada sistem komoditas kedelai nilai transfer output menunjukkan positif, berarti telah terjadi pengalihan surplus konsumen ke produsen maupun pedagang perantara, sebab harga yang diterima produsen lebih tinggi dari harga yang ada dipasaran bebas. Berarti campur tangan pemerintah yaitu dengan kebijakan harga, telah menyebabkan harga kedelai di dalam negeri lebih tinggi dari harga di luar negeri. Kondisi ini memberikan insentif kepada petani bahwa pengusahaan kedelai menguntungkan untuk perdagangan dalam negeri atau untuk substitusi impor, sehingga dapat mengurangi volume impor kedelai dari luar negeri. Adapun campur tangan pemerintah ini dapat ditunjukkan dari nilai-nilai NPCO yang nilainya lebih besar dari satu (1,04). Jadi campur tangan pemerintah ini dalam kegiatan sistem komoditas yang ada pada pengusahaan kedelai dapat meningkatkan pendapatan produsen sebesar 0,4 persen.

Nilai TO komoditas kedelai Rp. 158.201 memberikan indikasi adanya perbedaan penerimaan antara harga pasar dan harga sosial, artinya bahwa tidak ada campur tangan pemerintah di bidang harga. Kalaupun ada campur tangan pemerintah dibidang harga, namun tidaklah efektif atau tidak mempengaruhi penerimaan petani produsen kedelai. Nilai TO sebesar 158.201 mengindikasikan bahwa adanya subsidi dari pemerintah terhadap produsen kedelai. Pemerintah yang tidak campur tangan dalam penerimaan output ditunjukkan oleh nilai NPC sebesar 1,04. Jadi jelaslah bahwa komoditas kedelai masih ada insentif dari pemerintah terhadap surplus produsen/konsumen atau harga yang diterima oleh produsen kedelai sebesar 4 persen lebih mahal dari harga dunia. Hal ini dikarenakan perbedaan harga bayangan nilai tukar uang dengan nilai tukar yang berlaku sebagai akibat adanya kebijakan perdagangan dalam menentukan premium valuta asing. Dari kenyataan di atas TO kepada petani sebagian besar diperoleh dari konsumen.

Pada saat penelitian harga kedelai secara aktual diterima konsumen lebih tinggi (Rp.2.500-2.600) dari pada harga sosialnya (Cif) yaitu Rp 2.391,00, sehingga konsumen harus membayar lebih mahal dari harga seharusnya diterima (harga sosial), dengan demikian kesejahteraan konsumen lebih kecil. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan keunggulan komparatif kedelai lebih besar dibandingkan dengan keunggulan kompetitif.

Selain hal diatas, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi selain pada harga output juga pada harga input tradable. Subsidi input yang diberikan kepada produsen diharapkan dapat merangsang produsen untuk menggunakan input tersebut secara optimal sehingga akan terjadi peningkatan produksi dan produktivitas. Hasil analisis TI sebesar 170.996 memberikan indikasi bahwa adanya kebijakan pemerintah terhadap harga input *tradable* privat lebih mahal dibandingkan dengan harga sosialnya sehingga pengusahaan komoditas kedelai sudah menggunakan input produksi yang disubsidi oleh pemerintah saat ini. Kondisi ini membuktikan bahwa tanpa subsidi tersebut petani kedelai tidak diuntungkan. Sedangkan nilai NPCI sebesar 1,14 (14 persen) lebih mahal dari harga input tradable di tingkat dunia yang berarti pada pengusahaan komoditas kedelai di Kabupaten Banyuwangi pemerintah masih membebani produsen (petani) terhadap penggunaan input. Hal ini dapat terlihat pada input pupuk, sejak tanggal 2 Desember 1988 telah ditetapkan kebijakan penghapusan subsidi pupuk, sehingga

sumbangan pemerintah terhadap harga input tidak ada, justru petani memberikan pajak terhadap input. Jenis pajak yang dibayarkan petani adalah pajak untuk sarana dan prasarana umum baik dilokasi tempat tinggal maupun di lokasi pasar, pajak pelelangan pada perdagangan antara daerah terhadap komoditas yang laku dijual dan pajak lain dari harga input yang diterima petani. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan nilai TI dan nilai NPCI yang menunjukkan positif maka untuk komoditas kedelai tidak disubsidi oleh pemerintah.

Hasil analisis secara umum menunjukkan, kebijakan pemerintah pada input *non tradable* mengakibatkan barang domestik (*non tradable*) dibayar lebih tinggi dari harga sosialnya, terutama untuk biaya tenaga kerja. Dengan penggunaan input *non tradable* saat ini, produsen kedelai mengeluarkan pajak sebesar Rp 162.742 per hektar untuk produksi 1.537 kg. Hal ini mengindikasikan bahwa barang-barang domestik untuk komoditas kedelai dibayar lebih tinggi dari harga riilnya. Keragaan ini didukung oleh nilai NPT sebesar -175.537,83 yang mengindikasikan bahwa keuntungan privat lebih rendah dari pada keuntungan sosial.

Bila dilihat dari kebijakan output dan input *tradable* yang dilakukan oleh pemerintah bersifat disinsentif, artinya nilai tambah yang diperoleh dari penggunaan input *tradable* akan lebih besar jika pemerintah tidak melakukan intervensi pasar. Hasil parameter EPC untuk kegiatan produsen kedelai lebih kecil dari pada satu (<1) yaitu 0,99. Hal ini berarti kebijakan yang ada tidak melindungi produsen domestik sehingga nilai tambah yang diperoleh dari penggunaan input *tradable* akan lebih besar jika pemerintah tidak melakukan intervensi pasar atau melakukan kebijakan pasar bebas. Dengan kata lain kebijakan pemerintah tidak berkaitan dengan upaya-upaya pengangkatan nilai tambah bagi kegiatan tersebut di atas dan hal ini akan menghambat usahatani dan agroindustri untuk berkembang.

Nilai PC sebesar 0,77 berarti kebijakan pemerintah yang ada pada saat ini menghambat surplus produsen. Dari nilai SRP yang negatif mengindikasikan akibat dari kebijakan pemerintah tidak dapat meningkatkan pendapatan potensial petani kedelai sebesar 77 persen dari penerimaan sosial pada saat pemerintah melakukan kebijakan perdagangan bebas. Dengan kata lain produsen kedelai harus menanggung biaya produksi lebih besar 33 persen.

Analisis PAM agroindustri tempe dan tahu menunjukkan tidak terjadinya pengalihan surplus konsumen ke produsen maupun pedagang perantara mengingat harga yang diterima produsen sama dengan harga dipasar internasional. Berarti campur tangan pemerintah yaitu pada kebijakan harga, dimana harga kedelai didalam negeri lebih tinggi dari harga diluar negeri tidak mempengaruhi agroindustri tempe dan tahu, dengan nilai NPCO sebesar 1. Nilai ini mengindikasikan bahwa tidak adanya perbedaan harga privat dan harga sosial, jadi tanpa dan adanya campur tangan pemerintah agroindustri tempe dan tahu tidak berpengaruh dalam kegiatan berproduksi. Selanjutnya kebijakan terhadap input didapatkan nilai TI untuk tempe dan tahu sebesar 111,25 dan nilai NPCI 1,14. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan produksi tempe tahu yang dilakukan oleh para produsen ada campur tangan dari pemerintah.

Analisis transfer faktor bernilai positif menunjukkan adanya perbedaan harga sosial dan harga privat yang diterima produsen, khususnya untuk masukan-masukan produksi yang tidak diperdagangkan dipasar internasional. Transfer yang

bernilai positif memberi pengertian bahwa pada usaha agroindustri tempe dan tahu, barang-barang domestik dibayar dengan harga lebih tinggi dari harga yang sesungguhnya. Akan tetapi melihat parameter-parameter NPT kedua agroindustri tersebut negatif maka kebijakan yang berlaku pada saat ini tidak memberikan insentif kepada produsen disektor ini. Tampaknya perbedaan yang ada lebih disebabkan oleh perbedaan intensitas penggunaan tenaga kerja pada usahatani kedelai.

Lebih lanjut dengan melihat parameter EPC nilai lebih kecil dari satu maka sistem kegiatan tersebut tidak ada campur dari pemerintah, terutama terhadap harga output dan masukan *tradable*. Hal ini didukung oleh keragaan nilai *Koefisiensi Profitabilitas (PC)*, yaitu belum/tidak ada dorongan ke arah peningkatan nilai tambah sebagai akibat kebijakan pemerintah untuk kegiatan agroindustri tempe tahu. Ini berarti kebijakan pemerintah yang ada pada saat ini tidak menambah surplus produsen. Nilai parameter SRP yang negatif berarti akibat dari kebijakan pemerintah dapat mengurangi pendapatan bagi produsen di bidang agroindustri (tahu dan tempe)

Guna mengantisipasi keunggulan komparatif dan kompetitif diperlukan analisis sensitivitas seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis Sensitivitas Keunggulan Komparatif (KBSD_{sosial}) dan Keunggulan Kompetitif (KBSD_{aktual}) dengan Perubahan Harga SER dan NTR di Kabupaten Banyuwangi

Sistem Produksi	Perubahan			
	10%**	25%**	10%*	20%*
Perubahan SER terhadap KBSD _{sosial}	0,59	0,51	0,77	0,91
Perubahan NTR terhadap KBSD _{aktual}	0,65	0,55	0,86	1,02
Perubahan SER terhadap EPC	0,88	0,75	1,18	1,35

Sumber : Data primer, diolah 2003

Keterangan :**) Kenaikan harga
*) Penurunan harga

Analisis sensitivitas pada SER dan NTR dapat disimpulkan bahwa dengan kenaikan harga SER dan NTR semakin tinggi maka pengusaha komoditas kedelai akan mempunyai daya saing yang tinggi atau semakin tinggi nilai SER maka semakin kecil nilai KBSD_{sosial} atau semakin layak usahatani kedelai tersebut untuk diusahakan. Perubahan SER berpengaruh negatif terhadap perubahan nilai Koefisien Proteksi Efektif (EPC). Artinya semakin kecil tingkat SER maka semakin besar nilai EPC yang diperoleh petani domestik.

Kenaikan biaya pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja diatas 20 persen dari kondisi riil pada waktu penelitian dilakukan, keunggulan kompetitif dari pengusaha kedelai menuju nilai keunggulan kompetitif yang semakin rendah yang ditunjukkan nilai koefisiennya mendekati nilai 1 yaitu antara 0,80 – 0,81. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan perubahan ketiga faktor produksi tersebut sekitar 20 persen sangat peka terhadap keunggulan kompetitifnya.

Daya saing perusahaan komoditas kedelai juga dapat dilihat dengan analisis sensitivitas tingkat produktivitas output yang dihasilkan oleh usaha kedelai. Hasil analisis sensitivitas produktivitas komoditas kedelai dilakukan dengan penurunan produktivitas sebesar dua persen dan lima persen (1.506 l dan 1.460 Kg). Penurunan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya serangan hama penyakit. Penurunan tingkat produktivitas mengakibatkan *kerugian* petani. Penurunan tingkat produktivitas lima persen per hektar menyebabkan kerugian petani sebesar Rp 573.578,00. Penurunan sampai dua persen petani masih mendapatkan keuntungan sebesar Rp 89.320,00. Jika produktivitas kedelai naik persen (1.844 Kg/Ha) dengan tingkat keuntungan Rp 913.792,00 dan kenaikan produktivitas 30 persen (1.998 Kg/Ha) dengan keuntungan Rp 1.288.558,00 maka keunggulan komparatif dan kompetitif perusahaan kedelai naik mendekati dan menjadi ideal dengan $KBSD_{\text{sosial}}$ 0,46 dan $KBSD_{\text{aktual}}$ 0,50 seperti yang diutarakan oleh Porter (1994). Dengan demikian jika produktivitas naik dapat menghemat satu satuan devisa dengan memerlukan rupiah lebih kecil, karena dengan kenaikan produktivitas maka penerimaan yang diperoleh petani akan lebih tinggi.

Melihat kondisi di atas, maka salah satu strategi agar daya saing komoditas kedelai semakin meningkat adalah dengan jalan meningkatkan tingkat produktivitas. Disamping itu upaya lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan stabilitas hasil, penekanan senjang hasil dan kehilangan hasil saat panen serta pengolahan hasil. Ketiga hal tersebut akan memiliki respon jangka pendek yang nyata apabila ditangani secara baik. Pemberantasan hama penyakit, perbaikan manajemen usahatani dan perbaikan penanganan pasca panen memiliki potensi dan peluang peningkatan produksi yang cukup besar. Program penyuluhan dan pengembangan perlu diarahkan kepada ketiga aspek ini, untuk memperbaiki kinerja ekonomi dan daya saing komoditas kedelai, hal ini didukung oleh pendapat Sudaryanto *et al* (2001).

Selain analisis sensitivitas, keunggulan kompetitif dipengaruhi oleh tarif biaya masuk kedelai impor. Hasil analisis menyatakan tarif masuk kedelai impor sebesar 30 persen memberikan dampak terhadap daya saing yang semakin mantap dengan koefisien $KBSD_{\text{aktual}}$ 0,53, sedangkan apabila tarif masuk sebesar 40 persen akan memberikan keunggulan yang mantap dimana koefisiennya sebesar 0,4. Namun kondisi ini akan tidak dapat bersaing apabila kedelai impor disubsidi oleh negara asalnya (USA), sehingga yang terjadi adalah perdagangan internasional yang tidak *fair*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan harga pada sistem komoditas kedelai menghasilkan surplus produsen sebesar 4 persen. Surplus ekonomi ini menyebabkan produsen dapat bersaing dipasar domestik. Untuk menghadapi perdagangan bebas, kebijakan harga ini hanya mampu mencapai pendapatan potensial usahatani sebesar 77 persen dan agroindustri tempe tahu sebesar 91 persen. Dengan kebijakan harga tersebut komoditas kedelai masih mempunyai daya saing yang ditunjukkan oleh keunggulan komparatif dengan BSD_{sosial} sebesar Rp 6.253 atau $KBSD_{\text{sosial}}$ sebesar 0,67, dan keunggulan kompetitif dengan BSD_{aktual} sebesar Rp 6.888 atau $KBSD_{\text{aktual}}$ sebesar 0,74.

Kebijakan harga pemerintah yang berlaku untuk komoditas kedelai tidak memberikan insentif terhadap pengembangan agroindustri tempe tahu. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Effective Protection Coefficient* (EPC) dan *Profitability Coefficient* (PC) yang lebih kecil dari satu (< 1), serta *Subsidy Ratio to Producers* (SRP) yang negatif, baik untuk usahatani maupun agroindustri. Untuk meningkatkan daya saing komoditas kedelai dalam pengembangan agroindustri alternatif kebijakan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan produktifitas dan proteksi serta perlindungan harga output ditingkat petani.

SARAN KEBIJAKAN

Pelaksanaan pasar bebas (penghapusan subsidi dan proteksi) akan berdampak positif terhadap konsumen, tetapi merupakan *dis-insentif* bagi produsen, dan impor kedelai akan meningkat secara nyata. Kebijakan penghapusan subsidi sarana produksi (pupuk dan pestisida) dapat dipandang sebagai keputusan yang rasional secara teknis maupun ekonomis, namun tetap harus diimbangi dengan kebijakan proteksi harga (tarif impor) sebesar 30 persen sampai 40 persen yang dapat digunakan untuk mendorong adopsi teknologi dan peningkatan produksi. Disamping itu insentif non harga tetap diperlukan seperti penyuluhan, penciptaan teknologi, pengembangan infrastruktur (fisik dan kelembagaan) untuk mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik. 1985. *Statistik Industri Besar dan Kecil*, Surabaya.
- _____. 1991. *Biro Perencanaan Departemen Pertanian*, Jakarta.
- Hermanianto. D. 1997. *Pengembangan Industri Kecil Menengah Tahu dan Tempe*. Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pangan.
- Isard, Welter. 1969. *Method of Regional Analysis*. The MIT Press.
- Monke, Eric A and Scott R Person. 1989. *The Policy Analisis Matrix. A manual for Practitioner*. Office of Policy Development and Program Review Burau for Program and Policy Coordination U.S Agency for International Development. Washington DC
- Monke, Eric A and Scott R Person. 1989. *The Policy Analisis Matrix for Agricultural Development*. Cornel University Press.
- Nasir, M. 1985. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Porter, M.E. 2000. *Keunggulan Bersaing. Terjemahan*. Binapura Aksara, Jakarta